

## **Kronologi Data dan Peristiwa**

### **HARI-HARI PANJANG YANG MELELAHKAN**

Pengunduran diri Pak Harto sebagai Presiden RI, tentu saja tak luput dari adanya krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada pertengahan tahun 1997. Di mulai dari jatuhnya nilai mata uang Bath, Thailand terhadap Dollar, yang efek dominonya, merembet pula ke Indonesia, dimana nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah secara terus menerus.

Akibat dari krisis moneter, dimana situasi ekonomi tidak terkendali ini, berkembang menjadi krisis multidimensional yang berkepanjangan di berbagai bidang. Efeknya, sangat menyengsarakan rakyat karena harga-harga naik, BBM naik, hingga pelbagai unjuk rasa pun bergulir secara simultan. Krisis ekonomi kemudian berbuah menjadi krisis politik, yang berbuah pada pengunduran diri Pak Harto sebagai Presiden RI

Ibarat gelombang pasang. Meski telah legowo turun dari tahta kepemimpinannya secara konstitusional sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998, di tengah euforia Reformasi yang berhasil melengserkan Pak Harto, toh tetap saja Pak Harto dihujat, diburu, dihina, serta dianggap sebagai koruptor - meski hingga kini tak pernah terbukti.

Hari-hari panjang memang melelahkan. Pak Harto terus menerus dijadikan objek politik atas tuntutan KKN, tuduhan telah menumpuk kekayaan atas ke- 7 buah yayasan yang dikelolanya, tuduhan memiliki kekayaan luar biasa yang disimpan di luar negeri - yang notabene akhirnya tidak pernah terbukti — baik itu melalui opini publik, maupun lewat penyelidikan, pemeriksaan dan persidangan oleh pihak Kejaksaan Agung, yang diawali sejak 9 Desember 1998.

Hingga sekarang Pak Harto agaknya terus "diburu" dengan berbagai cara. Mulai dari pidana hingga perdata, kendati usia Pak Harto telah renta, dan mengidap berbagai komplikasi penyakit dalam tubuhnya.

Berikut catatan hari-hari yang melelahkan bagi Pak Harto yang terjadi pada 1998 hingga kini.

### **TAHUN 1998**

6 Januari 1998

Pemerintah menyampaikan RAPBN 1998/1999 yang dinilai masyarakat sebagai yang berat, rawan dan penuh resiko dengan kurs dollar Rp. 4.000 terhadap rupiah.

Aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa terus berlangsung. Harga barang kebutuhan pokok terus naik dan tidak menentu.

9 Januari 1998

Masyarakat panik memborong barang kebutuhan pokok di pasar swalayan dan pasar-pasar tradisional

16 Januari 1998

Guna meredam gejolak krisis moneter, Pak Harto menandatangani kesepakatan dengan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus.

22 Januari 1998

Mata uang rupiah anjlok ke level Rp. 17.000 per dol-lar AS. Saat itu kesepakatan RI dengan IMF soal reformasi ekonomi tidak berhasil. Dalam bidang politik, Pak Harto mengindikasikan B.J. Habibie — saat itu Menristek - akan dicalonkan sebagai Wakil Presiden.

12 Februari 1998

Pak Harto mengangkat Jenderal Wiranto - sebagai salah seorang yang setia pada Pak Harto - sebagai Menhankam/Panglima ABRI

10 Maret 1998

Pak Harto terpilih kembali untuk ketujuh kalinya sebagai Presiden Indonesia sedangkan mantan Menristek B.J. Habibie dipilih sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan 1998-2003.

11 Maret 1998

Pak Harto dilantik sebagai Presiden RI, dan BJ Habibie sebagai Wakil Presiden RI untuk masa bakti 1998-2003. Pak Harto mengucapkan sumpah jabatan.

13 Maret 1998

Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mem-peringatkan agar aksi mahasiswa jangan sampai anarkis dan destruktif

14 Maret 1998

Susunan Kabinet Pembangunan VII diumumkan. Aksi mahasiswa terus berlangsung dan bentrokan dengan aparat mulai terjadi. Mulai dalam skala kecil sampai besar.

23 Maret 1998

Bentrokan terjadi antara aparat dan mahasiswa di Universitas 11 Maret, Solo. Sebanyak 25 orang mahasiswa mengalami luka-luka.

24 Maret 1998

Mahasiswa mendatangi Komnas HAM memprotes kekerasan yang dilakukan aparat terhadap aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa

8 April 1998

Terjadi sebuah insiden Yogyakarta. Petugas ber-tindak tegas menghadapi aksi unjuk rasa di UGM dengan kekerasan menyebabkan sejumlah mahasiswa mengalami cedera dan luka-luka.

5 April 1998

Mendikbud melarang aksi unjuk rasa di kampus HApril1998

Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto menyelenggarakan dialog dengan 32 organisasi mahasiswa dan kepemudaan

15 April 1998

Mahasiswa se-jabotabek, lebih dari 30 kampus mengadakan aksi unjuk rasa serentak yang diikuti oleh ribuan mahasiswa

17April 1998

Sebagai Presiden, Pak Harto menyatakan agar aksi-aksi mahasiswa jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar.

18April 1998

Pemerintah, sejumlah menteri dan Pangab melakukan dialog dengan mahasiswa dan tokoh masyarakat di PRJ Kemayoran, guna meredam dan menenangkan situasi

1 Mei 1998

Pak Harto mengatakan reformasi politik baru bisa dimulai tahun 2003 ke atas, sesuai dengan GBHN yang telah disepakati

Dihadapan masyarakat Indonesia di Cairo, Presiden menyatakan jika rakyat sudah tidak akan meng-hendaki, ya silahkan. Dia tidak akan mem-pertahankan kedudukan dengan senjata. Di Jakarta, masyarakat berkabung atas gugurnya mahasiswa Pahlawan Reformasi. Jakarta mulai dilanda ke-rusuhan massa, rupiah melorot terhadap dollar sampai Rp.11.500

15 Mei 1998

Pak Harto tiba dari Cairo dini hari. Melalui Menpen Alwi Dahlan dikatakan, Presiden Soeharto tidak pernah menyatakan siap mundur. Tetapi jika masyarakat tidak percaya lagi, Presiden Soeharto akan lengser keprabon (turun tahta). Sementara itu kenaikan harga BBM dan listrik direvisi kembali oleh Pemerintah.

15 Mei 1998

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mem-rintahkan agar 8.000 warganya di Jakarta segera meninggalkan Indonesia. Juru bicara Kedutaan negara Amerika mengumumkan, bila warga mereka tidak memperoleh kursi di penerbangan komersial, akan dibantu dicarikan alternatif transportasi. Pemerintah Jerman juga telah melarang warganya yang hendak wisata ke Bali dan wilayah Indonesia. Larangan serupa, juga dikeluarkan pemerintah Tai-wan, China, Australia dan Filipina.

16 Mei 1998

Ketua DPR/MPR Harmoko usai bertemu Presiden Soeharto dan mengumumkan rencana Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.

17 Mei 1998

Menko Ekuin Ginadjar Kartasasmita memaparkan, di DKI Jakarta sedikitnya terdapat lima ratus satuan usaha yang mengalami gangguan. Jika satu usaha menyerap 10 pekerja, maka akan mencapai 50.000 orang yang mengalami gangguan, belum termasuk keluarganya.

18 Mei 1998

Pukul 09.00 WIB, sejumlah delegasi mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi maupun delegasi masyarakat mulai memasuki Gedung DPR. Be-berapa di antaranya di terima fraksi-fraksi.

Pukul 11.00 wib Gelombang mahasiswa yang mendatangi DPR semakin banyak dan makin siang mencapai ribuan orang. Aparat berjaga dengan simpatik. Aksi-aksi dilakukan di depan Gedung DPR. Mereka menuntut segera dilakukan Sidang Istimewa MPR serta pencabutan mandat MPR terhadap Presiden Soeharto.

Pukul 15.30 wib ketua DPR/MPR Harmoko mengumumkan rapat hasil pimpinan DPR/MPR yang meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.

Pukul 15.30 wib mahasiswa meninggalkan gedung MPR/DPR dengan puluhan bus yang disediakan oleh aparat keamanan.

Pukul 20.00 wib Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto menyatakan, bahwa pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mundur, merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun di-sampaikan secara kolektif.

21 Mei 1998

Pak Harto mengundurkan sebagai Presiden RI secara konstitusional dengan menggunakan Pasal 8

UUD 1945. Kedudukannya digantikan oleh B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil Presiden.

22 Mei 1998

Presiden BJ Habibie menunjuk sejumlah Menteri dan banyak menteri semasa rezim Soeharto diangkat kembali oleh Habibie.

29 Mei 1998

Aksi-aksi unjuk rasa Mahasiswa terus berlanjut. Tuntutan agar Pak Harto diperiksa dan diadili karena tuduhan KKN

1 Juni 1998

Presiden BJ Habibie mengatakan, pemerintah akan melakukan penyelidikan terhadap praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) selama Pak Harto berkuasa.

1 Juni 1998

Jaksa Agung Soedjono C Atmonegoro menugaskan JAM Datun Soehandjono meneliti harta kekayaan Pak Harto, termasuk kekayaan sejumlah yayasan yang didirikan dan dikelolanya selama Pak Harto menjabat Presiden.

1 Juni 1998

Dalam jumpa persnya, Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) memperkirakan kekayaan mantan Presiden Soeharto dan keluarga mencapai Rp. 200 triliun

1 Juni 1998

Putri pertama Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, dalam kesempatan memperingati hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, mengingatkan: "Jangan hujat Pak Harto".

2 Juni 1998

Pangab Jenderal Wiranto menghimbau kepada pihak-pihak yang terus menyuarakan reformasi agar tindakan dan kegiatan politik yang dilakukan dengan penuh kearifan dan dapat mengendalikan diri. Jauhi sikap salah menyalahkan, menghasut, menghujat, menista satu sama lain, mengkait berbagai permasalahan masa lalu yang hanya akan merusak konsentrasi bangsa melangkah ke depan yang penuh dengan kesulitan. Bangsa ini adalah milik kita bersama dan pilihan ada pada diri kita sendiri.<sup>1</sup>

3 Juni 1998

Ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Jabotabek, berbondong-bondong mendatangi Gedung MPR/DPR untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap wakil-wakil rakyat hasil Pemilihan Umum 1997. Dalam aksi di depan gerbang DPR, mahasiswa membacakan empat tuntutan, yakni pembentukan Komite Rakyat Indonesia, Penurunan Harga, penyelenggaraan pemilu ulang dan Pengadilan bagi Soeharto.

5 Juni 1998

Mantan wakil Presiden Sudharmono meng-umumkan isi kas beberapa yayasan yang dikelola oleh Pak Harto adalah senilai Rp. 2,47 triliun

8 Juni 1998

Kejagung membuka Kotak pos 777 untuk me-nampung informasi dan data dari masyarakat tentang harta kekayaan Soeharto dan keluarganya yang diduga diperoleh melalui Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

12 Juni 1998

Pak Harto melakukan shalat jumat di Masjid kompleks ABRI di Cilangkap

15 Juni 1998

Presiden B.J Habibie memberhentikan Jaksa Agung Soedjono C Atmonegoro dan menunjuk Mayjen TNI H. Andi Muhammad Ghalib sebagai penggantinya. Pada saat itu, Ghalib menyatakan akan melanjutkan penelitian atas kekayaan Pak Harto

17 Juni 1998

Mata uang rupiah anjlok hingga ke level Rp. 17.000 per dollar AS

3 Juli 1998

Semua keputusan Presiden (Keppres) dan instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur perolehan dana bagi yayasan yang dikelola Soeharto dicabut oleh Presiden Habibie.

30 Juli 1998

Sejumlah yayasan diserahkan Pak Harto kepada pemerintah, antara lain Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, RS Jantung Harapan Kita, dan RS Kanker Darmais, semua di Jakarta - serta ikut pula diserahkan dana sebesar Rp. 75,9 miliar

8 Agustus 1998

Bendahara yayasan Dana Kesejahteraan Abadi (Dakab) mengumumkan aset lembaga itu senilai 838 miliar. Kas itu diperoleh dari kucuran sum-bangan para pengusaha.

1 September 1998

Tim Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Pak Harto dari anggaran dasar lembaga tersebut.

2 September 1998

Pejabat Sementara Jaksa Agung Ismudjoko, di era Presiden BJ Habibie, menaikkan kasus Pak Harto ke tingkat penyidikan

6 September 1998

Pak Harto mengumumkan pernyataan pers melalui saluran Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). "Saya tidak punya uang satu sen pun", kata Pak Harto. Dalam wawancara dengan TPI, Pak Harto menyatakan tak memiliki kekayaan seperti yang pernah dilansir media massa. Juga tidak mempunyai kekayaan di luar negeri

9 September 1998

Tim Konsultan Cendana meminta kepada Presiden serta Menteri Pertahanan dan Keamanan agar memberikan perhatian ekstra ketat dan melindungi Pak Harto dari penghinaan, cercaan dan hujatan.

11 September 1998

Pemerintah Swiss menyatakan bersedia membantu pemerintah RI untuk mengetahui rekening-rekening milik Pak Harto

16 September 1998

Presiden Habibie menunjuk Jaksa Agung Andi Mohammad Gahlib sebagai ketua tim Pemeriksa Harta Pak Harto dan keluarganya.

21 September 1998

Jaksa Agung Andi M Galib dan Menko Pengawasan Pembangunan/Penertiban Aparatur Negara Har-tanto berkunjung ke rumah Pak Harto Jl. Cendana untuk mengklarifikasi kekayaan Pak Harto

25 September 1998

Pak Harto mendatangi Kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan dua konsep surat kuasa untuk mengusut harta kekayaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. 29 September 1998

Kejagung membentuk Tim Penyidik, Peneliti dan Klarifikasi Harta Kekayaan Pak Harto yang dipimpin Jampidsus Antonius Sujata.



2 Oktober 1998

Tim yang terdiri atas 2 Jaksa senior mengadakan rapat perdana di Gedung Kejaksaan Agung. Tugas Tim dibentuk oleh Jaksa Agung melalui SK Jagung No.Kep-092/J.A/10/1998. Tugas mereka meneliti, mengklarifikasi, dan menyelidiki kekayaan Pak Harto.

13 Oktober 1998

Badan Pertanahan Nasional mengumumkan tanah keluarga Cendana tersebar di 10 provinsi di seluruh Indonesia

22 Oktober 1998

Andi M. Ghalib menyatakan, keputusan Presiden yang diterbitkan mantan Presiden Soeharto sudah sah secara hukum. Kesalahan terletak pada pe-laksanaannya.

28 Oktober 1998

Tim Pusat Intelejen Kejaksaan Agung memeriksa data tanah peternakan Tapos milik Pak Harto.

13 November 1998

Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) membuat ketetapan MPR khusus menyangkut pemeriksaan Pak Harto. Soal pemeriksaan itu hanya menjadi bagian dari ketetapan MPR No.11/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998. Dalam pasal 4 Tap No.XI/MPR/1998 disebutkan: "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepo-tisme harus dilakukan dengan tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memerhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia".

21 November 1998

Presiden BJ Habibie mengusulkan pembentukan komisi independen untuk mengusut harta Pak Harto. Tapi, usulan ini kandas.

22 November 1998

Pak Harto menulis surat kepada Presiden Habibie, isinya tentang penyerahan tujuh yayasan yang dipimpinnya kepada pemerintah.

24 November 1998

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung memprotes pemeriksaan Pak Harto, yang mereka nilai lamban. Protes ini disimbolkan dengan menghadiahkan seekor ayam betina kepada Jaksa Agung.

2 Desember 1998

Presiden Habibie mengeluarkan Inpres No.30/1998 tentang pengusutan kekayaan Pak Harto.

5 Desember 1998

Jaksa Agung mengirimkan surat panggilan kepada Pak Harto

7 Desember 1998

Di depan Komisi I DPR, Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan atas tujuh yayasan Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Mus-lim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora. Sejumlah yayasan tersebut memiliki kekayaan senilai Rp. 4,014 triliun. Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 Bank di dalam negeri dengan nilai deposito Rp. 24 miliar, Rp. 23 miliar tersimpan di berbagai rekening BCA, dan tanah seluar 400 ribu hektare atas nama keluarga cendana.

9 Desember 1998

Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa Pak Harto. Pak Harto diperiksa tim Kejaksaan Agung, yang diketuai JAM Pidsus Antonius Sujata di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pemeriksaan sekitar empat jam, berkaitan dana yayasan, program mobnas, kekayaan di luar negeri serta soal Tapos di Bogor.

13 Desember 1998

Gus Dur bertemu Pak Harto via Bambang Triat-modjo

19 Desember 1998

Gus Dur bertemu Pak Harto via Tutut di cendana 28 Desember 1998 Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Hasan Basri Durin mengungkapkan, keluarga cendana atas nama pribadi dan badan hukum atau

perusahaan menguasai 204.983 hektare tanah bersertifikat hak guna bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM)

30 Desember 1998

Mantan Wakil Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo, seusai dimintai keterangan di Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa pembuatan Keppres dan Inpres tentang proyek mobil nasional Timor adalah perintah langsung dari Pak Harto.

## **TAHUN 1999**

12 Januari 1999

Tim 13 Kejaksaan Agung mengungkapkan, mereka menemukan indikasi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Harto.

19 Januari 1999

Pak Harto dan keluarga sholat jumat di Musholla Nurul Iman bersama 3000 jamaah di kampung Kalitan, Solo.

20 Januari 1999

Pak Harto mengadakan open house mengundang 100 warga kalitan, Solo

22 Januari 1999

Pak Harto dan keluarga berziarah ke makam ibu Tien di Astana Giribangun, Matesih, Karang Anyar, Solo.

4 Februari 1999

Kejaksaan Agung memeriksa Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung Pak Harto dalam kapa-sitasnya sebagai bendahara Yayasan Dana Gotong Royong kemanusiaan.

9 Februari 1999

Jaksa Agung Andi M. Ghalib melaporkan hasil investigasi 15 Kedutaan Besar Republik Indonesia yang menyimpulkan tidak ditemukannya harta kekayaan milik Pak Harto di luar negeri. Laporan dari Belanda menyebutkan hanya ada sebuah Masjid di daerah Reswijk, Belanda yang dibangun atas sumbangan pengusaha Probosutedjo, adik Pak Harto.

17 Februari 1999

Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Mayjen Syamsu Djalal diberhentikan dan diganti oleh Letjen TNI Yusuf Kartanegara. Syamsu dikabarkan pernah menyarankan Jaksa Agung agar pemeriksaan terhadap Pak Harto ditingkatkan ke tahap penyidikan, setelah bukti-bukti menyangkut kasus mobil nasional dan yayasan yang melibatkan Pak Harto dianggap cukup.

24 Februari 1999

Majalah Panji Masyarakat edisi 14 Februari 1999 memuat transkrip rekaman pembicaraan telepon antara Presiden B.J Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang mengesankan, pemerintah kurang serius dalam memeriksa Pak Harto.

9 Maret 1999

Jaksa Agung Andi M. Ghalib ditanyai oleh Komisi I DPR tentang materi dan substansi pembicaraan rekaman telepon Presiden B.J Habibie dan Andi M. Ghalib. Kalangan DPR mempersoalkan lam-bannya Kejaksaan Agung menangani kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pak Harto.

11 Maret 1999

Pak Harto melalui kuasa hukumnya, Juan Felix Tampubolon, meminta Jaksa Agung menghentikan penyelidikan terhadapnya atas dugaan KKN. Di depan rapat kerja Komisi I DPR, Menteri Kehakiman Muladi menyatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi terhadap Pak Harto harus diselesaikan pemerintah sebelum Sidang Umum MPR 1999, karena Presiden BJ Habibie harus memper-tanggungjawabkan penanganan kasus itu kepada MPR yang baru.

13 Maret 1999

Pak Harto menjalani pemeriksaan tim dokter yang dibentuk Kejaksaan Agung di RSCM

16 Maret 1999

Koran The Independent, London, memberitahukan bahwa keluarga Cendana menjual properti di London senilai 11 juta poundsterling (setara Rp. 165 miliar)

19 Maret 1999

Jaksa Agung Andi M. Ghalib berkomentar soal berita penjualan properti milik keluarga cendana di Lon-don. Kata Jaksa Agung, berita itu belum pasti karena baru berita koran. "Akan kami cek lewat Deplu, nanti", kata Ghalib

21 Mei 1999

Setelah shalat jumat, Pak Harto mengadakan konferensi pers selama 15 menit mengenai pem-beritaan majalah TIME. Seperti diketahui, Majalah Time menurunkan laporan investigasi tentang kekayaan Pak Harto dan anak anaknya, antara lain berupa uang kontan US\$ 15 miliar, simpanan di Bank Austria sebesar US\$ 9 miliar, tanah dan properti, barang - barang seni dan pesawat terbang jenis jet pribadi.

22 Maret 1999

Jaksa Agung Andi M Galib berkirim surat kepada Presiden BJ Habibie soal pemeriksaan Pak Harto yang perlu ditingkatkan

26 Mei 1999

JAM Pidsus Antonius Sujata, Ketua Tim Peme-riksaan Presiden Soeharto dimutasikan.

27 Mei 1999

Pak Harto menyerahkan surat kuasa kepada Kejagung untuk mencari fakta dan data berkaitan dengan simpanan kekayaan Pak Harto di bank-bank di luar negeri (Swiss dan Austria)

28 Mei 1999

Pak Harto kembali mengulangi pernyataannya, bahwa dia tidak punya uang sesenpun.

30 Mei 1999

Andi M. Ghalib dan Menkeh Muladi berangkat ke Swiss untuk menyelidiki dugaan transfer uang sebesar US 9 miliar dan melacak harta kekayaan Pak Harto lainnya di luar negeri

11 Juni 1999

Menkeh Muladi menyampaikan hasil penye-lidikannya, bahwa ternyata tidak ditemukan simpanan uang Pak Harto di bank-bank Swiss dan Austria

14 Juni 1999

Jaksa Agung Andi Ghalib dinonaktifkan 9 Juli 1999 Tiga kroni Pak Harto yaitu, Bob Hasan, Kim Yohannes Mulia dan Deddy Darwis diperiksa Kejagung dalam kasus yayasan yang dikelola Pak Harto

20 Juli 1999

Pak Harto terserang stroke ringan (Mild stroke). Pagi hari, Pak Harto menjalani pemeriksaan radiologi, dan kemudian langsung dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Kejagung meng-hentikan sementara penyelidikan atas kasus Pak Harto

28 Juli 1999

Kondisi kesehatan Pak Harto membaik. Bagian mulut yang diberitakan sebelumnya miring sudah kembali normal. Pak Harto menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan dari tim dokter kepre-sidenan seperti pemeriksaan kondisi syaraf secara menyeluruh (EEG) dan CT Scan

30 Juli 1999

Pak Harto meninggalkan RSPP Jakarta dan diha-ruskan beristirahat total di rumah. Izin pulang datang dari tim dokter kepresidenan yang dipimpin Dr. Ibrahim Ginting. Pak Harto ditemani oleh puteri sulungnya, Ny. Hj. Siti Herdiyanti Rukmana dan kedua adiknya, Siti Hediati dan Siti Utami Adining-sih dan Ibu Bresina, adik Pak Harto. Tim Dokter menyarankan agar Pak Harto untuk tidak melakukan aktivitas sehari-hari yang berat, termasuk juga menerima tamu.

1 Agustus 1999

Menkeh Muladi menyatakan, pemerintah akan tetap menyelesaikan kasus Pak Harto secara politis karena kondisi sakit.

5 Agustus 1999

Pejabat Jaksa Agung sementara Ismudjoko me-laporkan hasil penyelidikan KKN Pak Harto kepada Presiden Habibie.

14 Agustus 1999

Pak Harto kembali dilarikan ke RSPP karena pendarahan usus, dan diharuskan menjalani rawat inap. Pak Harto mengalami pendarahan usus saat hendak mengambil air wudhu untuk melakukan shalat subuh di kediamannya.

Kepala RSPP dr Sudjono Martoatmodjo dan Ketua Tim Dokter Ahli Presiden RI, dr Ibrahim Ginting, menyebutkan, sekitar pukul 05.00 WIB, Pak Harto mengalami pendarahan usus dan perlu segera mendapatkan pemeriksaan medis di rumah sakit.

Sekitar pukul 09.00 WIB, Pak Harto tiba di RSPP dan langsung mendapatkan pemeriksaan medis. Sebuah sumber di RSPP menyebutkan, Pak Harto kemungkinan besar menderita ambeien atau haemorroid akibat kebanyakan berbaring dan duduk selama proses penyembuhan, baik di RSPP maupun di rumah.

19 Agustus 1999

Setelah menjalani rawat inap, keadaan Pak Harto membaik dan diizinkan pulang dari RSPP

2 September 1999

Pejabat Sementara Jaksa Agung Ismudjoko menaik-kan kasus Pak Harto dari penyelidikan ke tingkat penyidikan

7 Oktober 1999

Tim Dokter Kepresidenan menerangkan Pak Harto masih dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat mengikuti pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Surat keterangan tim dokter ditandatangani oleh Dr. Hari Sabardi. Keterangan tersebut dibuat berdasarkan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medis.

11 Oktober 1999

Pemerintah menyatakan tuduhan korupsi terhadap Pak Harto tidak terbukti. Kemudian, Pjs. Jaksa Agung mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Peng-hentian Penyelidikan) terhadap Pak Harto, semen-tara aset yang ditemukan sudah diserahkan kepada pemerintah.

21 Oktober 1999

KH Abdurachman Wahid dilantik sebagai Presiden RI ke-4

1 November 1999

Presiden KH Abdurachman Wahid atau Gus Dur minta Jaksa Agung Marzuki Darusman membuka kembali kasus Korupsi Pak Harto.

6 Desember 1999

Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) kasus Pak Harto dicabut. Jaksa Agung di era Presiden Abdurachman Wahid, Marzuki Darusman menyatakan, akan membuka kembali kasus Pak Harto dan meneruskan penyidikan. Kemudian Jaksa Agung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Prin.096a/JA/12/1999

29 Desember 1999

Melalui kuasa hukumnya, Pak Harto mengajukan gugatan pra peradilan. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Soeharto atas pencabutan SP3

## **TAHUN 2000**

8 Januari 2000

Pak Harto dan keluarga shalat di Masjid AT - Tin TMII

18 Januari 2000

Sidang perkara gugatan Pak Harto terhadap majalah Time digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sihol Sitompul. Majalah Time (tergugat) melalui kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis mewakili Time tidak berhasil membuktikan rekening atau uang mantan Presiden Soeharto (penggugat) di Austria dan Swiss. Selain tergugat tidak dapat membuktikan adanya uang penggugat tersebut dalam jawabannya, penggugat memang tidak pernah memiliki satu sen pun uang di luar negeri. Demikian replik yang disampaikan kuasa hukum Pak Harto di antaranya adalah Juan Felix Tampubolon dan OC Kaligis.



Selama 32 tahun, semua kebijakan penggugat - Pak Harto — telah dipertanggungjawabkan dalam Sidang Umum (SU) MPR yang disetujui oleh wakil rakyat, tanpa kecuali. Tidak ada seorang warga negarapun, pada saat itu, melaporkan adanya uang yang disimpan di Austria dan Swiss sebagai uang rakyat Indonesia karena uang tersebut memang tidak pernah ada, apalagi mau disimpan di Austria dan Swiss."

10 Februari 2000

Kejaksaan Agung memanggil kembali Pak Harto sebagai terangka korupsi, tapi Pak Harto tidak datang karena sakit.

14 Februari 2000

Pak Harto diberitakan mengalami kesulitan berkomunikasi secara verbal

16 Februari 2000

Jaksa Agung Marzuki Darusman membentuk Tim Medis untuk memeriksa kesehatan Pak Harto.

15 Februari 2000

Pak Harto menolak memenuhi panggilan Panja BLBI DPR 18 Februari 2000

Panja BLBI DPR RI gagal menemui Pak Harto dan hanya memberikan pertanyaan tertulis soal Keppres tentang BLBI

24 Februari 2000

Tim Pengacara Pak Harto menyerahkan medical record pada Direktur Tindak Pidana Korupsi Khoirul Imam.

7 Maret 2000

Pak Harto dinyatakan sakit jasmani dan rohani, kemudian dibawa ke RSCM oleh Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan ulang. Karena pihak Kejagung tidak mempercayai tim dokter kepresidenan Pak Harto.

8 Maret 2000

Gus Dur mendatangi Pak Harto di jalan Cendana 13 Maret 2000

Pak Harto diperiksa tim dokter dari Kejagung di RSCM. Rencananya Pak Harto ditempatkan di Paviliun Cendrawasih I, namun tidak jadi. Wakil Direktur Pelayanan

Medik RSCM, dr Supardi mengatakan Pak Harto diperiksa oleh 6 dokter. Kejagung mengatakan tak akan ikut campur dengan pemeriksaan tim medis karena tak ingin ada anggapan tim medis itu dibentuk Kejagung

22 Maret 2000

Rekomendasi Tim Medis RSCM disampaikan kepada Kejagung

23 Maret 2000

Kejagung menegaskan akan tetap melanjutkan penyidikan terhadap Pak Harto.

27 Maret 2000

Kejagung mengeluarkan Surat Panggilan kepada Pak Harto untuk menemui Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 30 Maret.<sup>4</sup>

28 Maret 2000

Pak Harto menghadiri pernikahan cucunya, Danty Rukmana dan bertemu Gus Dur di TMII

29 Maret 2000

Tim Kuasa Hukum Pak Harto membeberkan laporan tim medis RSCM. Kesimpulannya Pak Harto tak dapat memenuhi panggilan Kejagung

30 Maret 2000

Pak Harto tidak datang ke Kejagung sesuai dengan surat panggilan Kejagung

31 Maret 2000

Pak Harto secara resmi dinyatakan tersangka dalam kasus penyalangunaan dana yayasan yang dipim-pinnya.

3 April 2000

Pak Harto kembali tidak dapat memenuhi panggilan Kejaksaan Agung

5 April 2000

Kejagung akhirnya mendatangi kediaman Pak Harto di jalan Cendana. Tim pemeriksa dan penyidik Kejaksaan Agung dipimpin Direktur Politik, Purnama Munte ke Cendana untuk memeriksa Pak Harto sebagai tersangka kasus

penyalahgunaan yayasan yang dipimpinnya. Namun, baru diajukan dua pertanyaan, tiba-tiba tekanan darah Pak Harto naik. Lalu pemeriksaan terhadap Pak Harto dihentikan. Pemeriksaan akan dilanjutkan tanggal 10 April 2000

7 April 2000

Direktur Tindak Pidana Korupsi Chairul Imam memastikan Pak Harto akan tetap diperiksa.

10 April 2000

Pemeriksaan Pak Harto kembali urung dilakukan karena kondisi kesehatan Pak Harto yang kian menurun. Pemeriksaan selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan dari tim medis RSCM

Jaksa Penyidik tidak berhasil melanjutkan pemeriksaan pro yustisia terhadap Pak Harto karena kondisi kesehatannya menurun. Tim dokter RSCM menyarankan agar dilakukan pemeriksaan kesehatan kembali secara komprehensif. Apabila pemeriksaan terhadap Pak Harto dilanjutkan oleh Kejaksaan akan mempertinggi resiko terjadinya stroke berulang.<sup>5</sup>

13 April 2000

Direktur Tindak Pidana Korupsi Chairul Imam menyatakan, Pak Harto dikenakan sebagai tahanan kota, masuk dalam daftar cekal, dan dilarang ke luar negeri

18 April 2000

Siti Hardiyanti Rukmana, Mbak Tutut, diperiksa sebagai saksi dalam kasus Yayasan Pak Harto di Kejagung. Putri Sulung Pak Harto ini diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai bendahara Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan. Tim penyidik Kejagung mengajukan 23 pertanyaan yang kesemuanya berhasil di jawab oleh mbak Tutut.

19 April 2000

Bambang Trihatmojo, diperiksa di Gedung Bundar Kejagung Jakarta, sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai bendahara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

29 Mei 2000

Pak Harto dikenakan tahanan rumah sampai dengan 10 Agustus 2000

30 Mei 2000

Gugatan Pak Harto terhadap majalah Time dika-lahkan

9 Juni 2000

Pegadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Pak Harto terhadap sah-tidaknya pencabutan SP3 atas dirinya

12 Juni 2000

Pihak Kejaksaan mengeluarkan surat perpanjangan kedua masa tahanan rumah bagi Pak Harto

17 Juni 2000

Pak Harto menjalani pemeriksaan otak di RS I Harapan Kita. Secara umum dikatakan kondisi Pak Harto selama pemeriksaan dalam keadaan sehat.

21 Juni 2000

Di hadapan masyarakat Indonesia di Kairo, Gus Dur mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan menggerakkan mahasiswa untuk berunjuk rasa, agar Pak Harto ketakutan dan kemudian bersedia menyerahkan kekayaan sampai 95 persen

27 Juni 2000

Puteri sulung Pak Harto, Siti Herdiyanti Rukmana membantah pernyataan Gus Dur. Kata Mbak Tutut/"Kalau Presiden Gus Dur mengetahui bahwa ada dana milik Bapak (Pak Harto) di luar negeri, ya alhamdulillah. Bila beliau (Gus Dur) menemukan, mohon perintahkan kepada yang berwenang untuk mengambil uang itu kemudian dipakai bagi kepentingan bangsa dan negara", tegas mbak Tutut menanggapi pernyataan Gus Dur.

27 Juni 2000

Tutut datang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa kembali sebagai saksi. Sebanyak 26 pertanyaan diajukan Jaksa berhasil dijawab oleh Tutut, yang kemudian mengatakan, pemeriksaan terhadap dirinya untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran uang dari yayasan Dana Gotong Royong karena ia adalah bendahara yayasan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Tutut berjanji akan meminta kepada ayahnya agar dibuatkan surat kuasa bagi pemerintah untuk pengambilan harta kekayaan Pak Harto di luar negeri sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Gus Dur sebesar US\$ 45 miliar. Sementara Pak Harto bersikukuh bahwa dirinya tidak memiliki uang sesen pun di luar negeri. Sedangkan harta kekayaannya di dalam negeri telah dilaporkan kepada pemerintah semasa Presiden BJ Habibie.

29 Juni 2000

Probosutedjo, adik Pak Harto menyarankan, agar pengusutan kasus KKN Pak Harto dilakukan dengan pembuktian terbalik. "Tetapi untuk mela-kukan hal itu harus ada uangnya dulu, ini loh uangnya, baru buktikan terbalik darimana dan bagaimana mendapatkannya, " katanya. Namun lanjutnya, hingga saat ini belum jelas ada uangnya. "Kalau uangnya saja belum ada, terus uang mana yang akan dibuktikan terbalik?."

7 Juli 2000

Kejagung mengeluarkan surat perpanjangan kedua masa tahanan rumah pada Pak Harto.

14 Juli 2000

Kejagung mengatakan, pemeriksaan terhadap Pak Harto dinyatakan cukup dengan meminta kete-rangan 140 saksi dan siap diberkaskan oleh Tim Kejagung

15 Juli 2000

Kejagung menyita aset dan rekening yayasan-yayasan yang dipimpin Pak Harto

20 Juli 2000

Villa Yayasan Dakab di Megamendung, Bogor, disita oleh pihak Kejagung, disusul dengan gedung Granadi di Jakarta.

26 Juli 2000

Berkas perkara Pak Harto diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

3 Agustus 2000

Pak Harto resmi dinyatakan sebagai terdakwa penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didiri-kannya.

4 Agustus 2000

Tim Medis RSCM menyampaikan laporan, Pak Harto menderita kerusakan otak sehingga kualitas pembicaraannya tidak dapat dijamin kebenarannya. Pak Harto dinyatakan menderita kerusakan otak permanen

8 Agustus 2000

Kejaksaan Agung menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

14 Agustus 2000

Pak Harto kembali masuk rumah sakit RSPP untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah melakukan pemeriksaan di ruang endoskopi, Pak Harto dibawa keluar menuju CT Scan lantai I VIP Sigit Harto-yudanto, anak tertua Pak Harto menyatakan, Pak Harto hanya cek kesehatan biasa

21 Agustus 2000

Mulai 21 Agustus 2000 Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran uang kertas pecahan Rp. 50.000 emisi 1993 dan 1995 yang bergambar Presiden Soeharto dari peredaran.

21 Agustus 2000

Perkara No.842/Pid.B/2000/PN Jakarta Selatan disidangkan di PN Jaksel, akan tetapi Jaksa tak bisa menghadirkan Pak Harto karena sakit

22 Agustus 2000

Menkundang Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses peradilan Pak Harto akan dilakukan di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.

23 Agustus 2000

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sidang pengadilan Pak Harto digelar pada 31 Agustus 2000. Pak Harto diperintahkan hadir.

31 Agustus 2000

Pak Harto tidak hadir dalam sidang, pengadilan pertamanya di Auditorium Departemen Pertanian Jl. Harsono RP, Ragunan, Jakarta Selatan. Tim Dokter menyatakan Pak Harto tidak mungkin dapat mengikuti persidangan. Dan hakim ketua, Lalu Mariyun memutuskan mesrianggil tim dokter

pribadi Pak Harto dan tim dokter RSCM untuk menjelaskan perihal kesehatan Pak Harto. Sidang akan dilanjutkan pada 14 September 2000.

2 September 2000

Kesehatan Pak Harto dikabarkan memburuk. 5 September 2000  
Ketua Majelis Hakim Peradilan Pak Harto, Lalu Mariyun menilai rekomendasi tim medis pribadi Pak Harto tidak up to date dan perlu dibentuk tim dokter independen

5 September 2000

Ketua Majelis Hakim Peradilan Pak Harto memper-panjang masa tahanan Pak Harto selama 60 hari.

6 September 2000

Presiden Gus Dur di New York menyatakan Pak Harto jika tidak bisa dipanggil dihadirkan dalam persidangan bisa diadili secara in absentia.

6 September 2000

Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan Kejagung telah mengirimkan surat panggilan kepada Pak Harto untuk menghadiri sidang pengadilan pada 14 September 2000

8 September 2000

Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan perkara Pak Harto ke pengadilan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) disebut perbuatan tersangka sebagai Presiden RI melakukan tindak pidana korupsi antara tahun 1978 sampai 1998. Namun dalam surat dakwaan tidak lagi disebut sebagai presiden, melainkan sebagai Ketua Yayasan yang melakukan perbuatan antara 28 Oktober 1985 s/d 15 Agustus 1999.

11 September 2000

Kuasa Hukum Pak Harto, M. Assegaf menegaskan surat panggilan Jaksa keliru

11 September 2000

Jaksa Agung berharap Pak Harto untuk tetap hadir kendati hanya mengganggu atau menggelengkan kepala di dalam persidangan.

12 September 2000

DPR mengundang Jaksa Agung dan akan memberi saran kepada Jaksa Agung soal Peradilan Soeharto, tapi Marzuki Darusman tidak hadir.

14 September 2000

Tim Dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dibentuk oleh Majelis Halim PN Jaksel untuk memeriksa kesehatan Pak Harto

14 September 2000

Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew menegaskan; "Pengadilan korupsi atas Soeharto yang sedang berjalan sebagai suatu kekeliruan. Bekas orang kuat Indonesia itu tidak pantas diperlakukan demikian, "sekalipun apabila dia itu brengsek." Pemimpin Singapura ini mengatakan tidak akan pernah berubah pikiran terhadap Pak Harto yang dikatakan berhasil mencegah suatu aksi kudeta yang dilakukan kelompok komunis pada 30 September 1965. "Dia telah mengambil alih Indonesia saat posisi berbahaya akibat keributan, ketakutan, dan anarkhi, Kalau kudeta itu berhasil, kami punya tetangga yang komunis." tambahnya.

14 September 2000

Peradilan ke II Pak Harto kembali digelar di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan. Pak Harto kembali tidak dapat hadir di persidangan karena sakit.

23 September 2000

Pak Harto menjalani pemeriksaan di RS Pertamina selama sembilan jam oleh 24 dokter yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Djakaria. Hasil pemeriksaan menunjukkan, Pak Harto sehat secara fisik, namun mengalami berbagai gangguan syaraf dan mental sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. Berdasarkan hasil tes kesehatan ini, pengacara Pak Harto menolak menghadirkan kliennya di persidangan.



28 September 2000

Kesehatan Pak Harto memburuk. Hakim menghen-tikan sidang. Majelis Hakim menetapkan penun-tutan perkara pidana Pak Harto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan. Tidak ada jaminan Pak Harto dapat dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatan. Majelis juga membebaskan Pak Harto dari tahanan kota.

28 September 2000

Dalam sidang pengadilan ini, tim Dokter Penilai Kejangung yang diketuai Prof Dr M Zakaria Spr dan 20 orang anggota timnya, menyimpulkan Pak Harto memang mengalami kesulitan menyampaikan apa yang dia inginkan. Pak Harto hanya mampu menjawab pertanyaan dokter pelan dan singkat. Menurut tim dokter, gangguan ini disebabkan stroke tiga kali yang pernah dialaminya. Pak Harto juga mempunyai riwayat penyakit, yang banyak, seperti kolesterol, jantung, tekanan darah tinggi, dan dia-betes. Dan memang semua itu pernah dialami Pak Harto sejak tahun 1970-an.

8 Nopember 2000

Kasus Pak Harto dibuka kembali 11 NopemberZOOO

Di Qatar Presiden Abdurachman Wahid meminta aparat memeriksa kembali kediaman Pak Harto. Presiden Gus Dur menyebutkan, bahwa ada satu ruangan bawah tanah (bunker) yang terletak di kediaman resmi Pak Harto.

13 Nopember 2000

Selepas magrib, tersiar kabar Pak Harto dalam keadaan koma. Menurut sekretaris pribadi Pak Harto, Anton Tabah, kondisi Pak Harto sejak kemarin pagi memburuk, napasnya tersengal-sengal. Semula Pak Harto tidak mau di oksigen, tapi setelah didesak dokter pribadinya, akhirnya ia mau dioksigen, pukul 08.00 Wib. Hingga pukul 22.30 tadi malam, Pak Harto masih mendapat bantuan pernapasan.

Pukul 23.10 Wib, di depan kediaman Pak Harto, datang enam polisi berseragam. Tampak juga Kapolsek Menteng Asisten Superintendent Paulus Waterpaw berpakaian preman. Sementara di kediaman Ny. Siti Hardiyanti Indra Rukmana sejak pukul 21.00 Wib diadakan pengajian. Kegiatan yang dilakukan 65 orang Habib itu berlangsung hingga pukul 23.15. Mereka datang dari Malang dan Pasuruan. Di rumah Ny. Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamik) pukul 09.30,

Pengacara Juan Felix Tampubolon dan tiga pengacara lain mengadakan pembicaraan dengan tuan rumah.

Pukul 23.15 WIB, Pengacara Juan Felix Tampubolon memberikan keterangan kepada pers di halaman rumah Pak Harto. Menurutnya, Pak Harto anfal pukul 11.00 WIB. "Bicaranya ngambang, kesehatannya memburuk. Dia terbaring terus di tempat tidur. Beliau didampingi empat dokter pribadinya. Semua berkumpul, kecuali Titiek Prabowo, Sigit dan Tommy," paparnya.<sup>9</sup>

14 Nopember 2000

Untuk membuktikan ada tidaknya ruang bawah tanah (bunker), polisi kembali mengeledah rumah Pak Harto dan rumah milik keluarga lainnya di sekitar Jl. Cendana dan Jl. Yusuf Adiwinata. Pengeledahan dipimpin langsung oleh Kaditserse Senior Superintendent Harry Montolalu. Guna keperluan pengeledahan, Polda membentuk 4 tim dengan menerjunkan setidaknya 8 SSK. Ada 4 tim yang diturunkan untuk mengeledah Cendana. Masing masing tim terdiri dari 7-8 orang. Bahkan Polisi juga memblokir ruas jalan di Cendana, Yusuf Adiwinata dan Rasamala dengan melibatkan 2 SSK. Hasilnya, bunker bawah tanah itu tidak ditemukan Polisi.

16 Nopember 2000

Kembali ada tambahan tuduhan bagi Pak Harto, kali ini terkait dengan kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh

## **TAHUN 2001**

2 Februari 2001

Majelis Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh dan setelah sembuh akan dihadapkan lagi ke persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memberituk tim pengobatan yang dipimpin DR. Dr. Ichramsyah A. Rahman. Sp OG.Kfer

24 Pebruari 2001

Pak Harto menjalani operasi usus buntu di RSPP 26 Pebruari 2001  
Kondisi kesehatan Pak Harto membaik meskipun selang infus belum dicabut

29 April 2001

Kondisi kesehatan Pak Harto kembali memburuk. Pak Harto menderita pendarahan saluran pencerna-an atau usus besar. Kondisinya terus memburuk karena sudah merembet ke jantung yang selama ini sudah dibantu dengan alat pacu jantung. Diberla-kukan peraturan baru yang melarang pembesuk yang ingin menjenguk Pak Harto.

13 Juni 2001

Pak Harto menjalani operasi pemasangan alat picu jantung permanen di RSPP. Menurut tim dokter, saat menjalani pemeriksaan oleh tim dokter pribadi bersama tim dokter RSCM, ditemukan frekuensi nadi rendah antara 30-40 permenit dalam tubuh Pak Harto. Kondisi demikian kurang menguntungkan untuk distribusi oksigen ke organ- organ tubuh penting seperti otak, ginjal dan jantung.

31 Juli 2001

Dr. Juniarti Hatta salah satu dokter yang merawat Pak Harto mengatakan adanya stroke yang berulang yang dialami Pak Harto beberapa waktu sebe-lumnya, menyebabkan lemahnya denyut nadi Pak Harto. Apalagi, Pak Harto juga menderita penyakit lain seperti diabetes dan ginjal.

Untuk perawatan lanjutan, tim dokter memutuskan agar Pak Harto menjalani Terapi Rekreatif yaitu dikunjungi oleh kerabatnya (saudaranya). Hal ini penting untuk ketenangan jiwa Pak Harto. Kemu-dian saat Pak Harto tiba di rumah sakit, tim dokter melakukan rapat dan memutuskan untuk mema-sang alat pemacu jantung di bahu kanan yang jaraknya empat centimeter dari jantung. Tim Dokter selanjutnya tetap memberikan laporan rutin tertulis kepada Kejaksaan Agung setiap satu bulan.

27 Agustus 2001

Tim dokter pemeriksa kesehatan Pak Harto menyatakan; dengan memperhatikan usia pasien yang telah lanjut, kelainan infark multiple di otak yang bertambah luas dan kelainan jantung yang tidak dapat diperbaiki, maka dapat dikatakan bahwa prognosis penyembuhan kondisi fisik dan men-talnya tidak dapat disembuhkan.

11 Desember 2001

Ketua Makamah Agung meminta Jaksa Agung menghentikan pengusutan kasus Pak Harto karena kesehatan mantan Presiden ini tidak memung-kinkan untuk diajukan ke pengadilan.

17 Desember 2001

Pak Harto kritis. Kemudian dilarikan ke RSPP karena menderita radang paru-paru — sesak napas dan batuk-batuk. Pak Harto menderita panas tinggi, batuk dan sesak napas. Tensi darah berkisar 180/70 dengan suhu 38-39 derajat celcius.

18 Desember 2001

Tim dokter menyimpulkan Pak Harto menderita pneumonia dengan gejala flu, batuk, demam, tidak mau makan dan diare. Namun karena pertimbangan non medis seperti faktor emosional dan kultural, seperti perayaan Idul Fitri, maka diputuskan Pak Harto untuk tetap di rumah dengan perawatan intensif. 28 Desember 2001

Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina selama 11 hari, Pak Harto pulang kerumah di jalan cendana No.8 Menteng, Jakarta Pusat. Pak Harto yang duduk di kursi roda, keluar didampingi putri sulungnya Siti Hardijati Rukmana, dan putra ketiga Bambang Trihatmodjo, serta beberapa dokter yang merawatnya. Mengenakan batik cokelat dan sarung warna ungu, Pak Harto sempat melambaikan tangan dan tersenyum.

## **TAHUN 2002**

26 Februari 2002

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta PN Jaksel membuka sidang kembali karena perkaranya berlarut-larut

14 Maret 2002

Putri bungsu Pak Harto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiiek, mengungkapkan kepada wartawan, kesehatan Pak Harto kian memburuk.

15 Maret 2002

Pak Harto kembali mengalami pendarahan dan harus di infus

16 Maret 2002

Kesehatan Pak Harto semakin menurun. Tim Dokter yang merawatnya mempersiapkan transfusi darah.

4 Juni 2002

Tim Dokter independen yang diketuai Akmal Taher menyimpulkan fungsi luhur Pak Harto terganggu

18 Juni 2002

Lebih dari 20 orang anggota tim dokter yang memeriksa kondisi kesehatan Pak Harto. Tujuh diantaranya adalah tim dokter independen RSCM yang ditunjuk Kejaksaan, sisanya adalah dokter keluarga Pak Harto. Hal ini dilakukan Kejaksaan untuk mengecek kebenaran berita, kondisi Pak Harto telah pulih dan membuka kemungkinan dibukanya kembali kasus dugaan korupsi.

12 Agustus 2002

Ketua Tim Dokter Pak Harto. Akmal Taher, mengungkapkan, secara umum kesehatan Pak Harto lebih maju dibanding saat terserang stroke pada 1999 dan pemeriksaan pada 1999 dan 2001. Namun kemampuan berbicaranya. Akmal menggambarkan, Pak Harto hanya bisa mengucapkan dua sampai empat kata yang mudah, sedangkan pertanyaan yang kompleks tidak bisa dimengerti dan dijawab Pak Harto.

29 Oktober 2002

Pak Harto berziarah ke makam Ibu Tien Soeharto, di Astana Giribangun, Mangadeg, Karanganyar. Ini merupakan ziarah pertama Pak Harto ke Giri-bangun, setelah sakit.

30 Oktober 2002

Anggota Tim pengacara Pak Harto Moh Assegaf menyatakan secara fisik Pak Harto memang tampak sehat dan dapat melakukan aktivitas kecil sehari-hari. Namun jika diajak berkomunikasi, lawan bicaranya pasti sulit memahami apa yang disampaikan oleh Pak Harto. Dia mencontohkan, Pak Harto memang masih bisa mengenali tim pengacara-nya yang datang bertamu, ia pun tetap bisa menjalankan Shalat lima waktu, meskipun menurut orang-orang di sekitarnya, shalatnya Pak Harto itu terkadang salah-salah.

30 Oktober 2002

Pak Harto membesuk anaknya, Tommy Soeharto di LP Batu, Nusa Kambangan dengan didampingi anak lelaki tertuanya, Sigit Haryoyudanto

12 Agustus 2002

Tim kesehatan dari RSCM menyatakan Pak Harto tidak mampu memahami kalimat panjang

### **TAHUN 2003**

29 April 2003

Kondisi kesehatan Pak Harto kembali memburuk. Pak Harto diberitakan menderita pendarahan saluran pencernaan atau usus besar. Kondisinya terus memburuk karena sudah merembet ke jantung yang selama ini sudah dibantu dengan alat pacu jantung. Tim Dokter memberlakukan peraturan baru, yang melarang pembezuik yang ingin men-jenguk Pak Harto.

Nopember 2003

Pak Harto berlebaran menengok Tommy Soeharto di Nusakambangan

15 Desember 2003

Kejari Mengirim surat ke tim dokter RSCM, agar pihak RSCM mengirim tim Dokter untuk meme-riksa Pak Harto

Desember 2003

Kejaksanaan Agung meminta kasus Pak Harto dibuka kembali

### **TAHUN 2004**

7 Januari 2004

Kejaksanaan Agung memerintahkan Kejaksanaan Negeri Jakarta Selatan, memeriksa kembali kondisi kesehatan Pak Harto. Permintaan untuk kembali memeriksa dilakukan setelah diketahui, Pak Harto mampu melakukan perjalanan ke Nusa Kambang-an, Cilacap, menjenguk Tommy Soeharto, saat lebaran 2003.

Menurut Fatwa Mahkamah Agung, pemeriksaan kasus dugaan korupsi Pak Harto bisa kembali dilanjutkan jika memang terbukti Pak Harto telah sehat. Tim Dokter RSCM dalam pemeriksaan terakhir, menyatakan Pak Harto menderita cacat psikologi permanen.

7 Februari 2004

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menemui Pak Harto di jalan Cendana, Jakarta Pusat.

10 Februari 2004

Pemeriksaan kembali kesehatan Pak Harto belum jelas. Kejaksaan Agung masih berkoordinasi dengan tim penasehat hukum dan pihak keluarga Pak Harto.

26 April 2004

Pak Harto kembali masuk Rumah Sakit. Ada pendarahan pada saluran pencernaan bagian bawah atau usus besar.

29 April 2004

Kondisi kesehatan Pak Harto kembali memburuk. Keterangan ini disampaikan salah seorang kerabat Cendana yang mengatakan, pendarahan saluran pencernaan atau usus besar Pak Harto masih berlangsung. Kondisi ini terus memburuk karena sudah merembet ke jantung yang selama ini sudah dibantu alat pacu jantung. Karena itu diberlakukan peraturan lagi, melarang pembesuk yang ingin menjenguk Pak Harto.

2 Mei 2004

Tim dokter RSPP mengumumkan kesehatan Pak Harto telah membaik .

## **TAHUN 2005**

5 Mei 2005

Pak Harto kembali dibawa ke RS Pusat Pertamina (RSPP) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena sejumlah gangguan kesehatan. Termasuk, komplikasi saluran dalam pencernaan dan jantung Pak Harto

8 Mei 2005

Wakil Ketua MPR A.M Fatwa menjenguk Pak Harto di RSPP, Fatwa malah sempat mencium dahi Pak Harto yang sedang terbaring di Ruang 604. "Saya tidak punya dendam apa-apa terhadap Pak Harto," ungkap AM Fatwa yang pernah dipenjara di LP Cipinang selama 18 tahun sejak 1984 karena terkait dengan kasus Tanjung Priok. "Politik dan kemanusiaan harus dipisahkan. Saya dihukum secara politis dan saya sudah direhabilitasi secara politis juga"

9 Mei 2005

Mantan Menteri Agama, M.Quraish Shihab dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membesuk Pak Harto di RSPP

10 Mei 2005

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meng-unjungi Pak Harto di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. SBY menjenguk Pak Harto yang terbaring di kamar 604 RSPP sekitar pukul 17.00 Wib. Ia berada di kamar itu sekitar 15 menit dan didampingi Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi dan juru bicara Kepresidenan, Andi M. Mallarangeng dan juga Mbak Tutut hadir disana.

Dengan suara terbata-bata dan lemah, Pak Harto sempat menyampaikan pesan pada Yudhoyono, katanya; "Presiden, tolong jangan lupa swasembada pangan."

Mantan Wapres, Try Sutrisno juga membesuk Pak Harto. "Sebagai bangsa yang besar, sudah sewa-jarnya masyarakat Indonesia memaafkan penguasa Indonesia selama 32 tahun ini." Langkah tersebut mengingat kondisi kesehatan Pak Harto yang lemah. Selain Try Sutrisno, mantan Menkopolkam, Soerono; mantan menteri pemberdayaan perempuan, Sri Rejeki Sumaryoto, dan mantan menteri Agama, Tarmizi Taher juga ikut menjenguk Pak Harto.

11 Mei 2005

Pak Harto keluar dari RSPP dan kembali ke rumah 21 Mei 2005

Tujuh tahun jatuhnya rezim orde baru diperingati mahasiswa Solo dengan aksi unjuk rasa, Massa dari BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) maupun BEM Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta mendesak Pak Harto bersama antek-antek orde baru untuk diadili di muka hukum.

29 Juni 2005

Pak Harto melayat ke rumah duka Cak Roes di Jalan Diponegoro 11, Jakarta Pusat 22-23 September 2005 Pak Harto berziarah ke makam orangtuanya di Bantul, Yogya, juga berziarah ke makam Ibu Tien Soeharto di Astana Giri Bangun, Solo

25 Nopember 2005

Dalam memperingati HUT Golkar yang 41 di Jakarta, Golkar akan mengadakan acara Pemberian Penghargaan "Anugerah Bhakti Pratama" dari Partai Golkar kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa membesarkan Golkar, termasuk di dalamnya



Pak Harto. Namun, acara acara pemberian penghargaan itu akhirnya dibatalkan karena adanya tekanan publik.

## **TAHUN 2006**

25 Januari 2006

Pak Harto melayat di rumah duka mantan Wapres Sudharmono di Jalan Senopati I No.44/B, Jakarta Selatan

22 Februari 2006

Pak Harto menerima kunjungan Lee Kuan Yew di kediamannya, jalan Cendana No 8, Jakarta Pusat.

21 April 2006

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh meminta tim medis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk segera memeriksa kondisi kesehatan Pak Harto, berkaitan dugaan kasus korupsi yang akan dibuka kembali

23 April 2006

Pak Harto menghadiri acara akad nikah cucunya, Gendis Siti Hatmanti dengan Arif Putra Wicaksono, di Masjid At Tin, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah

3 Mei 2006

Pak Harto menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohammad di kediaman-nya, Jalan Cendana no 8, Jakarta Pusat

4 Mei 2006

Pak Harto kembali dirawat di RSPP karena terjadi pendarahan usus.

7 Mei 2006

Pak Harto menjalani operasi pembedahan karena pendarahan usus

7 Mei 2006

Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi membesuk dan mengunjunginya Pak Harto di RSPP, dengan suara pelan Pak Harto kembali menyampaikan pesannya untuk Yudhoyono, "Agar pemerintah berjalan dengan baik"

8 Mei 2006

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjenguk Pak Harto di RSPP bersama Menko Kesra Aburizal Bakrie. Usai menjenguk Pak Harto, Kalla menegaskan "Buat apa kita memikirkan proses hukum kepada mantan Presiden Soeharto yang dalam keadaan kesehatan seperti itu. Saya kira, negeri ini harus berbesar hati kepada pemimpinnya".

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie juga juga mengatakan kasus hukum Pak Harto supaya dihentikan. "Beliau adalah mantan presiden, sudah uzur, kita hormati, kita tempatkan dia dalam sejarah republik kita", katanya usai menjenguk Pak Harto.

Menurut Jimly, saat ini boleh dikatakan tidak ada lagi kelompok yang menginginkan Pak Harto diadili, terutama setelah Yudhoyono menjadi Presiden. "Artinya, sebetulnya (kasus Pak Harto) sudah selesai. Karena itu, saya kira kita tutup buku saja"

8 Mei 2006

Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif datang menjenguk Pak Harto. Seusai menjenguk, ia meminta kejaksan Agung segera menghentikan pemeriksaan ulang kesehatan atas mantan Presiden Soeharto. Zainal juga meminta agar Pak Harto dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagai penghargaan atas jasa-jasanya.

10 Mei 2006

Setelah meminta saran dari pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Presiden SBY menyatakan, peme-rintah tidak akan melanjutkan perkara mantan Presiden Soeharto di Pengadilan yang selama ini terhenti karena alasan kesehatan

Pemerintah mengumpulkan dokumen untuk penyelesaian Kasus Peradilan Pak Harto. Namun pemerintah masih mempertimbangkan bagaimana bentuk penghentian itu, apakah dengan amnesti, abolisi, dideponir (membekukan perkara) atau menghentikan perkara. Menurut, Widodo Penyele-saian status Pak Harto didasarkan pada pertim-bangan politik, ekonomi, hukum, kemanusiaan, kesehatan, moral, preseden sejarah, sikap terhadap para mantan presiden sebelumnya, dan melihat emosi masyarakat.

11 Mei 2006

Hasil pertemuan dari tim Dokter independen dan tim dokter Pak Harto, kesehatan mantan Presiden ini tidak menggembirakan.

11 Mei 2006

Pencegahan ke Luar Negeri dicabut oleh Putusan MA. Kepala Kejari Jaksel mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

12 Mei 2006

Presiden SBY menyatakan pemerintah akan mengendapkan kasus Pak Harto. Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) terhadap Pak Harto

12 Mei 2006

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, menuntut Pak Harto diadili.

12 Mei 2006

Di surat kabar berbagai komentar para tokoh bermunculan menanggapi pengadilan Pak Harto;

Megawati (Mantan Presiden)

"Sebagai bangsa yang besar, saya mengajak semua elemen bangsa ini untuk memiliki jiwa besar. Jika seseorang itu sudah tidak layak untuk diajukan ke pengadilan, lalu apa yang mau kita dapatkan?"

Gus Dur (Mantan Presiden)

"Yang jelas saya hanya menganjurkan satu hal saja. Pak Harto itu selain kejahatannya, haruslah diingat kelebihan atau jasa-jasanya untuk bangsa kita. Gimana seterusnya, itu bukan urusan saya."

Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR)

"Sebelum ada amnesti dan abolisi, lebih baik ada solusi di Tap MPR XI/1998 ini dengan cara membuat UU, baru kemudian bisa dibahas." UU itu yang berisikan penyelesaian kasus hukum Pak Harto.

Arief Budiman (Budayawan)

"Pak Harto perlu diadili untuk menegakkan tradisi bahwa orang yang bersalah harus dihukum."

Pramono Anung (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan)

"Kesalahan beliau, seperti pemerintahan yang represif dan praktek korupsi, harus diungkapkan kepada publik agar menjadi catatan sejarah bagi anak-anak bangsa."

Amien Rais (mantan Ketua MPR)

"Sebelum diampuni, harus diproses hokum terlebih dahulu. Kalau tidak, yang rugi rakyat, karena hukum sudah pilih kasih."

Usman Hamid (Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

"Soeharto tidak mengaku bersalah, jadi kita mau memaafkan siapa? Korban penindasan Soeharto yang berhak menentukan apakah dia dimaafkan atau tidak. Pembebasan Soeharto akan membuat seluruh kejahatan kemanusiaan di masa lalu menjadi tanpa arti".

Artidjo Alkotsar (Hakim Agung)

"Proses hukum tidak bisa dihentikan karena alasan usia dan jasa seseorang".

Hendardi (Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)

"Alasan demi rasa kemanusiaan, untuk tidak mengadili Soeharto, justru merupakan pelanggaran terhadap pemberantasan kejahatan kemanusiaan."

Hasyim Muzadi (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama)

"Kasusnya semua ditutup, selesai."

Mochtar Biki ( adik Amir Biki, korban kekerasan Tanjung Priok)

"Mereka menggembar-gemborkan penegakkan hukum, tapi nyatanya tebang pilih. Apa urusannya memberikan maaf kepada Soeharto, sedangkan dia belum terbukti bersalah atau tidak? Mengampuni itu baik, Tuhan saja mau memberikan maaf, masak kita tidak mau. Tapi harus jelas dulu apa salahnya."

19 Mei 2006

Presiden SBY dan isteri membesuk Pak Harto ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

20 Mei 2006

Keluarga Pak Harto minta maaf kepada rakyat In-donesia. Masih dalam keadaan sakit dan terbaring di rumah sakit Pertamina, melalui anaknya Mbak Titi atau Siti Hedyati Hariyadi, pada 20 Mei 2006, Pak Harto ikut menyumbang dana sebesar Rp. 100 juta untuk membantu korban pengungsi Gunung Merapi di Jogjakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, di Yogyakarta, atas nama keluarga Cendana, Siti Hedyati mengemukakan :

"Pak Harto adalah manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, selama 30 tahun beliau memimpin bangsa ini, ada hal-hal yang tidak berkenan dan ada kesalahan-kesalahan beliau buat, kami mohon maaf"

20 Mei 2006

Lingkar Survei Indonesia (LSI) melakukan survei dengan jumlah responden 438 orang. Survei tidak dilakukan melalui telepon, tetapi wawancara tatap muka. Metode survei adalah multi stade random sampling. Hasilnya, besarnya responden yang memaafkan Pak Harto adalah 65,1 persen. Sedangkan yang tidak bisa memaafkan mantan Presiden itu hanya sebesar 23,2 persen.

31 Mei 2006

Pak Harto diizinkan pulang dari RSPP setelah dirawat selama 27 hari di rumah sakit. Pak Harto sempat menjalani operasi pematangan usus sepanjang 40 senti meter, Pak Harto diijinkan meninggalkan Rumah Sakit, Kondisi kesehatannya membaik, tapi para dokter tetap akan mengawasi perkembangan kondisi Pak Harto. "Beliau masih memakai pengaman, yaitu selang yang ada di dalam perut Pak Harto belum dilepas," kata koordinator tim dokter spesialis dari Tim Dokter Kepresidenan, Prof Djoko Rahardjo di RSPP

31 Mei 2006

Mentan Presiden Abdurrahman Wahid mene-gaskan, Pak Harto harus tetap diadili apabila yang bersangkutan sudah keluar dari rumah sakit. Langkah ini diperlukan untuk menegakkan hukum. "Soeharto harus tetap diadili. Salah benarnya di pengadilan," ucap Gus Dur se usai menghadiri acara Akbar Tandjung Institute di Hotel Hilton, Jakarta. Menurutnya, kepemimpinan Pak Harto memang tidak seluruhnya jelek, namun bukan berarti bangsa ini langsung memaafkan Pak Harto tanpa proses pengadilan. Sementara itu, Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, me-nyatakan dirinya tidak mau menilai Pak Harto. Dia

merasa tidak etis memberikan penilaian. "Kita untuk apa menilai. Masa lampau itu untuk sejarah saja."

8 Juni 2006

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung. Mereka menyikapi pengeluaran Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) oleh Kejaksaan Agung.

12 Juni 2006

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jaksel Andi Samsan menyatakan SKP3 Soeharto tidak sah

16 September 2006

Pak Harto menghadiri acara akad nikah cucunya, pernikahan Dany Bimo Hendro Ulomo Rukmana dan Lulu Luciana Tobing di Mesjid At-Tin, Taman Mini, Jakarta Timur.

5 Oktober 2006

Adik Pak Harto, pengusaha Probosutedjo mengunjungi Pak Harto di kediamannya, Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Kepada adiknya, Pak Harto me-ngatakan agar Pak Probo tetap memberikan bantuan kepada rakyat, khususnya para petani. "Kamu pasti sanggup dan bisa membantu mereka. Saya sekarang tidak punya berdaya apa-apa"